

India, Srilanka, dan Masalah Tamil

Wisnu DEWANTO

Di dalam perjanjian perdamaian yang ditandatangani Pemerintah Srilanka dan India di Colombo tanggal 29 Juli 1987 yang lalu kedua pemerintahan sepakat untuk menyelesaikan konflik etnis di Srilanka yang telah berkembang sejak tahun 1983 dan mengorbankan lebih dari 7.000 jiwa. Konflik ini juga telah menyebabkan kemunduran perekonomian, politik dan sosial budaya Srilanka di samping merawankan hubungan bilateral kedua negara dan stabilitas kawasan. Sekitar 40.000 pasukan pemelihara perdamaian India kini ditempatkan di Srilanka guna mendukung pelaksanaan perjanjian itu untuk batas waktu yang belum menentu.

Perjanjian itu mencerminkan India sebagai "superpower regional" yang berusaha menanamkan pengaruh di negara-negara tetangganya. Bahkan tindakan India telah dinilai sebagai usaha intervensi nyata dalam masalah dalam negeri suatu negara sehingga mengkhawatirkan negara-negara lain di kawasan. Tulisan berikut hendak membahas latar belakang perjanjian perdamaian India-Srilanka dan kemungkinan implikasinya bagi kawasan Asia Selatan.

PERKEMBANGAN MASALAH ETNIS DI SRILANKA

Srilanka dewasa ini sedang menghadapi kemelut politik dalam negeri yang berkepanjangan antara kelompok etnis Sinhala dan Tamil. Konfrontasi politik antara kedua suku bangsa itu dimulai beberapa tahun setelah kemerdekaan negeri itu dari Inggris tahun 1948.¹ Seperti halnya masalah etnis pada umum-

¹Sebagai latar belakang, lihat antara lain De Silva, *The Sinhalese-Tamil Rift in Srilanka dalam*

nya, konflik etnis di Srilanka bersumber pada masalah agama, bahasa, sosial ekonomi, hak-hak politik, konsesi dan privelege antara minoritas Tamil (13%) dan mayoritas Sinhala (74%). Mayoritas Sinhala menganggap bahwa kaum minoritas Tamil telah banyak menikmati keuntungan yang tidak sebanding dengan jumlahnya sehingga politisi Sinhala mencoba mengurangi peran mereka.²

Tahun 1956 di bawah pemerintahan SWRD Bandaranaike, Parlemen Sri Lanka mengeluarkan undang-undang untuk mengganti bahasa Inggris dengan bahasa Sinhala sebagai bahasa resmi negara. Ketetapan ini kemudian diikuti oleh serangkaian kebijakan pembatasan peran suku Tamil khususnya di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Meskipun kebebasan beragama diakui, hanya Budha yang merupakan agama mayoritas Sinhala disebut dalam Konstitusi. Pemerintah juga tidak mengakui adanya suatu daerah yang merupakan tempat leluhur suatu suku termasuk wilayah Utara dan Timur yang diyakini sebagai wilayah leluhur masyarakat Tamil. Dalam lingkup pendidikan, kesempatan bagi pemuda Tamil untuk masuk ke perguruan tinggi sangat terbatas. Hal serupa terjadi dalam hal kesempatan kerja dan pemukiman sehingga mereka merasa menjadi warganegara nomor dua di Srilanka.

Merasa mempunyai identitas tersendiri dan kemampuan untuk menjadi bangsa yang mandiri serta didukung oleh kedekatan geografis dengan wilayah Tamil Nadu di India Selatan dengan mayoritas (50 juta) suku Tamil, mereka menuntut otonomi regional bagi wilayah Utara dan Timur Srilanka disertai sikap menentang Pemerintah Colombo. Sikap ini tercermin dalam bentuk protes dan kerusuhan yang berkepanjangan terutama pada tahun 1956, 1958, 1977, 1981 dan 1983. Pemikiran untuk membentuk negara terpisah muncul tahun 1960, dipelopori oleh kelompok muda Tamil (*the boys*) yang mengalami frustrasi dengan kenyataan yang ada. Tetapi baru tahun 1972 mereka membentuk kelompok "Front Pembebasan Tamil Bersatu" untuk memperjuangkan berdirinya suatu negara *Tamil Eelam* (sebutan Srilanka bagi masyarakat Tamil) terpisah dari Colombo di wilayah Utara dan Timur Srilanka.

Bagi Pemerintah Srilanka yang dikuasai oleh mayoritas suku Sinhala tuntutan masyarakat Tamil ini tidak mudah diterima. Terciptanya suatu negara

²Komposisi penduduk di Srilanka selain Sinhala (74%) dan Tamil (13%) juga terdapat Muslim (7,1%), Tamil India (5,6%) dan Burgers (golongan campuran) 0,3%. Pada masa kolonial Inggris suku Tamil mendapat posisi terhormat di lingkungan pemerintahan dan di bidang ekonomi. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial suku Sinhala yang menguasai pemerintahan.

terpisah merupakan tabu bagi Pemerintah Colombo. Para pemimpin pemerintahan berkeyakinan bahwa dalam suatu bentuk republik kesatuan suatu pembagian kekuasaan adalah hal yang tidak mungkin. Dan meskipun di Srilanka masyarakat Tamil terpusat di propinsi Utara dan Timur, hampir separo jumlah mereka berdomisili di luar dua propinsi tersebut. Lagipula suku Tamil India yang berjumlah 5,6% dari jumlah penduduk Srilanka dan bekerja di perkebunan teh di Srilanka Tengah tampak kurang antusias terhadap rencana separatisme. Demikian pula masyarakat Tamil yang hidup membaaur di kota-kota besar seperti di Colombo.³

Upaya untuk memecahkan masalah ini sudah sejak lama ditempuh Pemerintah Srilanka. Segera setelah terbentuknya Front Pembebasan Tamil Bersatu (TULF) yang pada tahun 1977 mengikuti pemilihan parlemen, Pemerintah Colombo di bawah Presiden Jayewardene segera memperhatikan tuntutan kelompok ini. Pemerintah berusaha memasukkan kembali bahasa Tamil sebagai bahasa resmi dan memperlonggar hak-hak mereka untuk masuk ke universitas dan jabatan-jabatan penting pemerintah. Parlemen Daerah dibentuk dan pada awalnya TULF bersedia terlibat di dalamnya. Tetapi kurangnya pendelegasian kekuasaan pemerintahan dan keuangan kepada distrik Tamil di Utara dan Timur menyebabkan TULF menarik diri. Rasa ketidakpuasan muncul kembali dan memuncak dengan terjadinya pembunuhan 13 personil militer di Semenanjung Jafna tanggal 13 Juli 1983. Peristiwa ini menyulut berbagai kerusuhan yang lingkupnya menyeluruh di wilayah Srilanka.⁴ Kelompok separatisis bawah tanah, yang kebanyakan anggotanya adalah kelompok Tamil muda, mulai melakukan perampokan dan berbagai tindak kekerasan untuk mewujudkan tuntutannya. Digambarkan sebagai teroris, gerilyawan atau pejuang pembebasan, gerakan ini dikenal luas sebagai gerakan "Macan Pembebasan Tamil Eelam."

Di dalam gerakan yang mencakup sekitar 30 kelompok perjuangan dengan sekitar 10.000 pejuang ini ternyata tidak memiliki kesatuan langkah dalam memperjuangkan tujuan mereka. Di antara mereka paling sedikit terdapat empat kelompok besar yang merasa mewakili kepentingan Tamil di Srilanka. *Pertama*, "Front Pembebasan Tamil Bersatu" (TULF) yang merupakan organisasi politik terbesar dan paling efektif dalam perjuangannya. Pemerintah Colombo menilai kelompok ini paling moderat dan menjadi partner dalam

³Lihat Bruce Matthews, "Radical Conflict and The Rationalization of Violence in Srilanka," *Pacific Affairs*, Vol. 59, No. 1 (Spring 1986): hal. 41.

setiap upaya mengakhiri konflik dengan jalan perundingan. Para pemimpin kelompok ini banyak menggunakan basis perjuangan di wilayah negara bagian Tamil Nadu di India Selatan. *Kedua*, "Macan Pembebasan Tamil Eelam" (LTTE) yang merupakan kelompok yang paling militan dan didukung sistem persenjataan yang terbaik. Senjata mereka dipasok melalui orang-orang Tamil di luar negeri yang menaruh simpati pada perjuangan Tamil. Gerakan yang dipimpin V. Prabakaran ini diperkirakan melakukan kerjasama dengan organisasi teror negara lain dan menjalankan garis politik radikal serta menentang garis politik moderat TULF.

Ketiga, Organisasi Pembebasan Tamil (TELO), yang merupakan kelompok perlawanan bersenjata yang berhaluan moderat dan menentang garis keras LTTE. *Keempat*, Organisasi Revolusioner Eelam (EROS) yang dipelopori oleh kelompok mahasiswa militan dengan lebih banyak menyerap haluan Marxis dan melakukan kerjasama dengan Partai Komunis terlarang Srilanka *Janatha Vimukti Peramuna (JVP)*. Selain itu dikenal pula *PLOTE (People's Liberation Organization of Tamil Eelam)* dan *EPRLF (Eelam People's Revolutionary Liberation Front)*. Banyaknya kelompok dengan ciri tersendiri ini di samping melemahkan perjuangan mereka, juga menyulitkan Pemerintah Colombo untuk mencapai penyelesaian politis.⁵

Dalam konteks regional, berkepanjangannya masalah Tamil telah menjadi masalah yang potensial dapat mengancam hubungan Srilanka dengan India. Kedua pemerintahan mempunyai alasan masing-masing untuk saling curiga. Pemerintah Srilanka tidak dapat menerima kenyataan bahwa kelompok militan Tamil mendapatkan basis militer dan bantuan persenjataan dari masyarakat Tamil Nadu. Srilanka menuduh India kurang tanggap dalam masalah ini dan bahkan melakukan kerjasama terselubung dengan kelompok Tamil. Kesulitan New Delhi dalam hal ini dapat dipahami mengingat daerah Tamil Nadu dewasa ini dibanjiri ribuan pengungsi Tamil. Sepanjang pertempuran dan bentuk kerusuhan belum terselesaikan di Srilanka mereka akan terus melakukan aktivitas mendukung gerakan perjuangan kelompoknya di Srilanka.⁶

⁵ Lebih jauh tentang kelompok pejuang Tamil, lihat Matthews, "Radical Conflict," *ibid.*

⁶ Perjuangan kelompok Tamil menuntut suatu negara terpisah mendapat simpati besar dari partai-partai politik di negara bagian Tamil Nadu antara lain partai politik Madras DMK (Dravida Munnetra Kazhagam), dan AIADMK (All-India Alliance DMK). MG. Ramachandran yang meninggal 24 Desember 1987 telah dikenal sebagai Kepala Menteri Negara Bagian Tamil

Di samping itu Pemerintah India juga memiliki pertimbangan politik dalam negeri menghadapi simpati yang begitu besar dari masyarakat Tamil Nadu India pada masalah Tamil di Srilanka. Di samping jumlahnya meliputi 50 juta di India, kelompok etnis Tamil juga menempati posisi yang baik di kalangan birokrasi pemerintahan, media komunikasi, kelompok intelektual dan akademisi India.⁷ Partai-partai politik di negara bagian Tamil Nadu secara tradisional merupakan partner dalam politik nasional Partai Kongres yang kini berkuasa di India. Hal ini sering mempengaruhi kebijakan luar negeri pemerintah khususnya dalam hubungan bilateralnya dengan Srilanka.

Dalam memainkan peran sebagai negara besar di kawasan India cukup berhati-hati dalam masalah ini. Ia selalu menolak tuduhan bahwa pemerintahannya memberikan dukungan dan membiarkan wilayahnya menjadi basis perjuangan kelompok Tamil militan Srilanka. Upaya diplomatik untuk menyelesaikan permasalahan sudah banyak ditempuh. India bersedia menjadi mediator antara pihak Pemerintah Srilanka dan kelompok militan Tamil dalam mencari penyelesaian politis. Hal ini tampak dalam berbagai forum pertemuan di antaranya *All Party Conference* tahun 1984, Pembicaraan di Thimpu (Ibukota Bhutan) tahun 1985 yang dilanjutkan dengan kesepakatan pembuatan kerangka perdamaian antara Pemerintah India dan Srilanka, tetapi akhirnya tidak mendapat tanggapan positif dari TULF maupun kelompok lain.

Upaya Pemerintah India selanjutnya adalah mendesak TULF berunding dengan Colombo bulan Juli dan Agustus 1986. Di sini Pemerintah Jayawardené memberi konsesi yang lebih luas dalam hal otonomi lokal, pendidikan, tanah dan pemukiman. Tetapi kesediaan TULF berunding dengan Colombo justru dianggap sebagai pengkhianatan oleh LTTE yang tetap tidak mau berunding dan tetap militan dalam upaya mewujudkan tuntutan. Kegagalan dalam setiap upaya perundingan agaknya justru meningkatkan upaya melalui tindak kekerasan. Hal ini diimbangi pula oleh tindakan tanpa kompromi Pemerintah Colombo untuk melenyapkannya. Peningkatan serangan dan upaya penghancuran oleh Pemerintah Colombo ini tampak jelas setelah pasukan pemerintah melancarkan ofensif besar-besaran sejak tanggal 6 Februari 1987 untuk memaksa suatu bentuk perundingan. Hal ini ternyata mendapat tanggapan lain dari Pemerintah India dengan pengiriman secara

bantuan dan hubungan pemimpin-pemimpin pejuang Tamil di Srilanka dengan Madras. Lihat juga Ahsan Ali Khan, "The Tamil Question in Historical Perspective-Its Impact on Indo-Lankan Relations," *Pakistan Horizon*, Vol. 37, No. 3 (1984): hal. 42-70.

kontroversial bantuan kemanusiaan yang akhirnya menjadi awal terwujudnya perjanjian perdamaian India-Srilanka pada tanggal 29 Juli 1987.

LATAR BELAKANG PERJANJIAN

Perjanjian yang ditandatangani kedua kepala pemerintahan di Colombo akhir Juli 1987 tersebut pada dasarnya dibagi dalam dua bagian. Pertama adalah penataan kembali ketatanegaraan Srilanka dengan pemberian hak yang lebih besar kepada minoritas Tamil. Hal ini diwujudkan dengan pengakuan persamaan hak dan otoritas serta pengakuan tanah tumpah darah tradisional Tamil di Propinsi Utara dan Timur Srilanka. Kedua berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri kedua pemerintahan yang intinya dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan upaya penciptaan stabilitas kawasan Asia Selatan.

Secara terinci perjanjian itu memuat berbagai ketentuan pokok antara lain: Propinsi Utara dan Timur Srilanka yang sekarang ini masih menjadi ajang perjuangan kelompok Tamil akan dijadikan suatu wilayah gabungan baru dan dijalankan oleh suatu pemerintahan khusus. Pemerintah khusus ini berada di bawah arahan suatu dewan sementara yang memiliki kekuasaan otonomi yang luas. Suatu referendum akan diselenggarakan akhir tahun 1988 untuk memberi kesempatan penduduk propinsi timur untuk menentukan apakah propinsi ini akan bergabung dengan propinsi utara sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan atau menjadi suatu propinsi terpisah yang memiliki pemerintahan tersendiri. Dalam hal ini Presiden Srilanka berdasarkan kekuasaannya dapat menetapkan penundaan referendum tersebut. Selain itu Presiden Srilanka akan memberikan amnesti umum kepada para tahanan politik dan bersama India merehabilitasi anggota militer muda untuk kembali ke kehidupan sipil.

Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut, Pemerintah India menjamin bahwa wilayahnya tidak diperkenankan dipakai untuk kegiatan yang sifatnya mengancam kedaulatan Srilanka sebagai suatu negara. Untuk itu angkatan laut dan pengawal pantai India akan bekerjasama dengan Angkatan Laut Srilanka untuk mencegah kegiatan militan Tamil yang memanfaatkan Selat Palk untuk mensuplai senjata dan peralatan perjuangan lainnya. India akan mempercepat repatriasi penduduk Srilanka yang melarikan diri ke wilayah Tamil Nadu dan bersama-sama dengan Pemerintah Srilanka menjamin

resmi di Srilanka di samping bahasa Sinhala.

Perjanjian pokok ini dilengkapi dengan pertukaran nota antar kedua pimpinan pemerintahan yang isinya, antara lain, bahwa referendum dan pemilihan dewan propinsi akan diawasi oleh wakil-wakil Pemerintah India; pasukan Pemerintah Srilanka dan peralatannya harus ditarik dari propinsi Utara dan Timur dan segera dilaksanakan penyerahan senjata dari kelompok Tamil untuk menjamin kelancaran proses pemilihan dewan propinsi di wilayah tersebut. Selain itu dimungkinkan pengiriman pasukan pemelihara perdamaian India ke Srilanka apabila dikehendaki Colombo untuk mengawasi penyerahan senjata Tamil.

Dalam nota ditekan pula tekad masing-masing pihak untuk tidak menggunakan wilayah masing-masing untuk kegiatan yang sifatnya merusak kesatuan, kedaulatan dan integritas serta keamanan kedua negara. Dalam hal ini kedua pihak telah sepakat untuk meninjau kembali relevansi penempatan pasukan dan personil intelijen asing dengan saling memberi jaminan bahwa kehadiran mereka bukan bersifat memusuhi atau mengancam hubungan kedua negara. Pelabuhan strategis Trincomalee di pantai Timur Srilanka serta pelabuhan-pelabuhan lain tidak akan digunakan untuk kegiatan yang memusuhi India. Pengoperasian depot minyak di Trincomalee yang selama ini banyak mendapat bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat mengalami peninjauan kembali dan kemungkinan akan diusahakan dalam bentuk patungan dengan Pemerintah India.

Demikian pula perjanjian Pemerintah Srilanka dengan organisasi penyiaran asing yang beroperasi di Srilanka akan ditinjau kembali untuk melihat jangan sampai digunakan untuk kegiatan intelijen yang merugikan kepentingan India. India akan mendeportasikan penduduk Srilanka yang kedapatan terlibat dalam kegiatan teror dan pasukan keamanan kedua pemerintahan akan meningkatkan mekanisme konsultatif tentang penempatan pasukan dan bantuan militer asing.⁸

Perjanjian yang berisi berbagai macam ketentuan tersebut cenderung menguntungkan kepentingan India. Hal ini sedikit banyak diakui oleh Rajiv Gandhi dengan mengatakan bahwa perjanjian ini tidak akan mudah diterima dan dilaksanakan Pemerintah Srilanka. Di dalam tubuh pemerintahan Colom-

⁸Mengenai naskah perjanjian, komentar serta wawancara dengan Rajiv Gandhi maupun Jayewardene tentang perjanjian, lihat "India-Srilanka Accord," *Strategic Digest* (September 1987):

bo sendiri, sikap kontra terhadap perjanjian tampak jelas. Perdana Menteri Premadasa dan sejumlah menteri sangat menentang isi perjanjian yang cenderung semakin melibatkan India dalam masalah domestik Srilanka. Hal ini tercermin dengan ketidakhadirannya pada saat penandatanganan perjanjian dan pengunduran sejumlah menteri dalam kabinet segera setelah penandatanganan dilakukan. Kelompok penentang perjanjian yang dipelopori kelompok oposisi dan para rahib Budha menilai perjanjian ini sebagai "penjualan Srilanka kepada India."⁹

Kendati demikian Jayewardene tetap melakukan penandatanganan perjanjian, yang dianggapnya merupakan pilihan terbaik untuk menyelamatkan Srilanka dari akibat berlanjutnya masalah Tamil. Beberapa faktor pendorong menyebabkan negarawan tertua di Asia ini memilih pengakhiran konflik melalui perjanjian dengan India. Pertama adalah faktor dalam negeri Srilanka sendiri terutama situasi perekonomian. Srilanka pernah dikenal sebagai negara yang mantap dalam bidang perekonomian. Kebijakan ekonominya sering dipakai sebagai contoh negara Dunia Ketiga dalam pembangunan ekonominya.¹⁰ Tetapi tahun-tahun terakhir yang ditandai perang saudara yang tidak berkesudahan telah menjadi hambatan dalam proses pembangunan Srilanka karena mengalirnya dana untuk kepentingan militer. Pembelian militer telah membengkak dua kali lipat dari 1.050 juta rupee tahun 1981 menjadi 2.300 juta rupee tahun 1983. Anggaran pertahanan tahun 1985 mencapai 3,6 milyar rupee di samping sekitar 2 milyar dollar untuk perbaikan infrastruktur pertahanan. Perkiraan akhir menunjukkan bahwa perang dengan kelompok Tamil telah menghabiskan dana sekitar 12 milyar rupee atau sekitar 407 juta dollar AS per tahun dari pengeluaran total Srilanka per tahun yang berjumlah sekitar 65 milyar rupee.¹¹

Faktor lain adalah situasi politik dalam negeri Srilanka yang dirasakan semakin buruk sejak pertengahan bulan Mei tahun 1987. Di samping masih disibukkan oleh kemacetan penyelesaian tuntutan separatist Tamil, Pemerintah Colombo menghadapi kelompok Marxis bawah tanah *Janatha Vimukti Peramuna* yang melakukan terorisme di Selatan.¹² Ideologi Marxis yang men-

⁹Iftekharuzzaman & Humayun Kabir, "The Indo-Srilanka Agreement," *ibid.*, hal. 458.

¹⁰Lihat antara lain Thomas Gibson, "Srilanka Economic Growth and Equity," *Contemporary South East Asia*, Vol. 4, No. 2 (September 1982): hal. 174-183.

¹¹Iftekharuzzaman, *The Indo-Srilanka*, hal. 460.

¹²Akhir tahun 1987, gerakan ini dituduh Pemerintah Srilanka bertanggungjawab terhadap pembunuhan sekitar 3.000 pejabat dan anggota parlemen. Tentang JVP lebih lanjut lihat Wiens-

jadi dasar gerakan ini mendapat simpati yang cukup besar di kalangan masyarakat Sinhala yang menilai Jayewardene terlalu lemah dalam menjalankan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perekonomian, pendidikan dan ketenagakerjaan. Colombo juga mengkhawatirkan berulangnya kembali peristiwa tahun 1971, ketika gerakan ini mendalangi pembunuhan pemimpin-pemimpin pemerintahan yang menimbulkan korban sebanyak 1.200 orang. Kelompok ini juga terbukti mengadakan hubungan dengan kelompok Tamil militan berhaluan kiri (EROS) dalam serangkaian tindakan pemboman di Colombo menjelang penandatanganan perjanjian. Hal ini memaksa Jayewardene berhadapan dengan dua front di Utara dan Selatan.

Menghadapi kenyataan ini, bagi Jayewardene perdamaian berarti kesempatan untuk membangun kembali perekonomian dan kehidupan politik yang baru di Srilanka. Perang berarti pemotongan yang berarti atas sektor-sektor pendapatan negara yang besar khususnya pariwisata. Berakhirnya perang tidak hanya berarti berkembangnya kembali turisme di Srilanka tetapi juga peningkatan kualitas hidup di Srilanka karena diharapkan penyaluran dana untuk keperluan militer akan mengalir ke sektor lain untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini diharapkan akan mengundang kembali modal asing dan mengalirnya bantuan luar negeri untuk pembangunan.

Tekanan yang terus menerus dari Pemerintah India merupakan faktor kedua yang memaksa Pemerintah Jayewardene melaksanakan penandatanganan perjanjian. Awal tahun 1987, Pemerintah Colombo menempuh jalan keras terhadap pemberontak Tamil dengan mengirimkan 300 pasukannya ke Semenanjung Jaffna. Tindakan ini dibarengi blokade bahan makanan di propinsi Utara (Semenanjung Jaffna) yang menyebabkan India bereaksi lain. Semakin langkanya bahan makanan dan meningkatnya korban sipil di daerah Tamil mengundang India melakukan apa yang disebut intervensi damai Gandhi (Operasi Poomalia).¹³ Sejumlah kapal nelayan yang membawa makanan dan obat-obatan dikirimkan dengan alasan untuk membantu korban sipil. Angkatan Laut Srilanka menghadang maksud ini dan menghendaki agar bantuan itu disalurkan melalui Colombo, serta membantah kurangnya bahan makanan di daerah tersebut. Beberapa hari setelah gagal melalui laut satu skuadron pesawat angkut buatan Soviet dengan dikawal empat pesawat tempur Mirage dikirim ke Srilanka dan menjatuhkan sekitar 25 ton bahan makanan dan obat-obatan.

Apa yang dilakukan India menunjukkan sikap tegas Rajiv Gandhi dalam unava damai menvelesaikan masalah Tamil. Pemerintah India sangat menye-

salkan penanganan dengan kekerasan dan mengancam akan menarik diri dari keterlibatannya sebagai mediator. Pemerintah Srilanka menyadari bahwa pembicaraan langsung kelompok Tamil dengan Colombo akan terhambat tanpa keterlibatan India. Disadari pula bahwa pilihan militer tidak saja tidak dapat diterima, tetapi juga mengundang sikap keras India. Meskipun demikian dengan menuduh India melakukan tindakan intervensi terang-terangan atas kedaulatan Srilanka, Colombo melancarkan tekanan diplomatik baik melalui Forum PBB maupun SAARC. Palang Merah Internasional mengancam tindakan India, dan dua minggu kemudian Dewan Menteri SAARC bertemu. Dalam Forum SAARC, Colombo mendesak negara-negara kawasan untuk lebih memperhatikan masalah kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara serta penghindaran suatu agresi, campur tangan dan pemaksaan kehendak. Tanggapan dari anggota SAARC muncul tetapi tidak terlalu vokal, mengingat organisasi regional ini sebenarnya tidak pernah menerima mandat untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut hubungan bilateral negara anggota.¹⁴

Faktor ketiga adalah kenyataan bahwa setelah India memaksakan pengiriman bantuan tersebut Pemerintah Colombo seakan-akan sendiri tanpa ada reaksi ataupun dukungan dari negara luar. Reaksi dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat tidak tampak. Stephen Solarz, pejabat Sub Komite Luar Negeri Senat Amerika mengatakan lebih baik menjatuhkan bantuan daripada bom.¹⁵

KEPENTINGAN INDIA

Menghadapi berkepanjangannya masalah Tamil yang dirasa semakin mengganggu kepentingan politik dan keamanan India, Pemerintah New Delhi bertekad untuk menyelesaikannya guna mewujudkan kesatuan dan stabilitas Srilanka. Upaya mencari penyelesaian politis sejak empat tahun terakhir dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian didorong oleh tekad itu. Peran India semula sebagai mediator kini menjadi penjamin atau guarantor. Ada dua alasan kuat bagi India untuk segera menyelesaikan masalah Tamil. Pertama adalah dalam rangka upaya Rajiv Gandhi mengembalikan citra politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kedua adalah penerapan strategi kawasan untuk kepentingan keamanan nasionalnya.

¹⁴Lihat Endi Rukmo, "Perkembangan di Asia Selatan," *Analisa*, No. 2 (Februari 1987): hal.

Dalam tahun 1987, yang merupakan tahun ketiga pemerintahan Rajiv Gandhi, India mengalami beberapa krisis politik dalam negeri. Silih berganti ia terlibat konflik serius dengan para pejabatnya sendiri, pendukung gerakan separatis dan dengan negara-negara tetangganya. Masalah gerakan separatis yang sejak dulu menjadi masalah utama India belum menunjukkan penurunan. Masyarakat Punjab (Sikh), Assam dan untuk tingkat tertentu Tamil menghendaki negara terpisah dari New Delhi. Aktivitas rakyat Bengali Barat dan umat Islam di India yang berjumlah sekitar seratus juta juga telah banyak menyita perhatian Rajiv.

Popularitas Rajiv di dalam negeri juga terusik oleh ketidakserasian hubungan pemerintahannya dengan Presiden Zail Singh yang kini digantikan oleh Venkataraman. Konflik antara dua pemimpin pemerintahan itu terkuak setelah tersebarinya isu Rajiv berbohong kepada parlemen tentang hubungan kerja mereka. Presiden merasa tidak pernah dilapori tentang masalah luar negeri dan masalah penting dalam negeri sesuai dengan ketentuan konstitusi yang menyangkut penyediaan informasi bagi presiden. Hal lain adalah tuduhan Rajiv menerima komisi sekitar 40 juta dollar dari Bofors untuk mendapatkan kontrak pembelian senjata senilai 1,3 milyar dollar AS. Lagipula, meningkatnya kembali ketegangan dengan Pakistan tentang masalah Kashmir dan dengan Cina tentang masalah perbatasan pada tahun 1987 membuat dirinya dicap sebagai penggemar perang.¹⁶

Adanya beberapa permasalahan di atas disertai ketidakpuasan mayoritas Hindu dengan cara-cara yang ditempuh Gandhi dalam menangani setiap bentuk ancaman kelompok ekstrem dan separatis menyebabkan kemerosotan popularitas Partai Kongres yang dipimpinnya dalam pemilihan Majelis dan Parlemen (Maret 1987) di beberapa negara bagian India. Kekalahan di negara bagian Haryana yang merupakan basis kekuatan tradisional Partai Kongres, di Punjab, Assam dan Bengala Barat mengisyaratkan Gandhi untuk segera mengembalikan citra politik dalam negerinya. Rombak merombak kabinet untuk menghilangkan krisis intern partai yang pada tahun 1987 tercatat sebagai perombakan ke sepuluh sejak ia berkuasa bulan Oktober 1984, berkaitan erat dengan upaya tersebut. Penanganan masalah separatis Tamil di Srilanka agaknya juga dipakai Rajiv dalam menarik simpati masyarakat Tamil bagi kepentingan domestik maupun internasional India di kawasan.

Masalah keamanan dan strategis serta peran yang dimainkan sebagai kekuatan regional Asia Selatan merupakan kepentingan kedua India untuk me-

nyelesaikan masalah Tamil. Hal ini tampak jelas dalam pokok-pokok perjanjian seperti jaminan keterlibatan pihak asing yang intinya mengganggu kepentingan India tidak diperkenankan muncul di Srilanka, jaminan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Srilanka termasuk Trincomalee tidak akan diberikan untuk kepentingan militer sepanjang bertentangan dengan kepentingan India dan jaminan bahwa fasilitas penyiaran di Srilanka tidak dipakai untuk kegiatan intelijen militer asing. Dapat dikatakan bahwa India tidak hanya menginginkan adanya jaminan Colombo atas masalah-masalah tertentu seperti di atas, tetapi juga berusaha menarik Srilanka dalam orbit keamanannya. Dengan ini India mempunyai kesempatan baik untuk mewujudkan keinginannya memperluas parameter keamanannya.

Strategi pertahanan dan keamanan India merupakan penajaman konsep kontinental yang diwarisi dari pemerintah kolonial Inggris. Sedikitnya ada tiga pilar yang harus ditegakkan India untuk mewujudkannya.¹⁷ Pertama adalah menjaga front Utara-Barat yang berbatasan dengan beberapa sumber kerawanan politik bagi India seperti Pakistan, Cina, Nepal dengan masing-masing permasalahannya. Kedua mencegah daerah-daerah sekitar sub-kontinen India jatuh dalam pengaruh asing dan sampai tingkat tertentu menguasai kawasan Samudera Hindia. Yang ketiga adalah mencegah setiap ancaman terhadap negara-negara penyangga (*buffer states*) dalam lingkup parameter keamanannya.

Para pemimpin politik India hingga kini sedikit banyak melestarikan konsep ini. Pandangan Nehru tentang persatuan yang lebih erat (*closer union*) dan konfederasi negara-negara merdeka dengan satu pola keamanan dan pengaturan perekonomian dengan India merupakan cikal bakal gagasan serupa dengan Doktrin Monroe yang diungkapkannya tahun lima puluhan dan selanjutnya dikembangkan Indira Gandhi menjadi Doktrin Indira. Doktrin ini, yang merupakan salah satu bukti bahwa India ingin memegang peranan sebagai pemimpin regional,¹⁸ menekankan bahwa India tidak akan mentolerir tindakan intervensi luar dalam konflik di salah satu negara Asia Selatan jika intervensi itu mempunyai akibat secara implisit atau eksplisit anti India. Jika suatu

¹⁷Tentang strategi keamanan India berkaitan dengan kebijakan luar negerinya, lihat antara lain, VP. Dutt, *India Foreign Policy* (New Delhi: Vani Educational Books, 1984), khususnya Bab I dan II.

¹⁸Untuk mendukung keinginan regionalnya ini India terpaksa menggunakan standar ganda karena ia menerima bantuan militer dari Uni Soviet. Kerjasama India-Soviet yang terutama ditujukan untuk menandingi kerjasama Pakistan-AS dan mendukung peran regionalnya di kawasan

negara Asia Selatan bersungguh-sungguh menangani konflik internal seharusnya meminta bantuan negara di kawasan termasuk India. Tidak diikutsertakannya India dalam suatu bentuk tindakan regional terhadap suatu masalah dalam negeri suatu negara kawasan, akan dipertimbangkan sebagai persekongkolan anti India. Dalam kaitan ini India tampaknya menafsirkan bantuan militer Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Pakistan, Bangladesh dan sampai tingkat tertentu Afrika Selatan kepada Srilanka sebagai ancaman dan tercakup dalam doktrin tersebut.

Dalam konteks kerjasama regional SAARC doktrin ini mendapatkan versi lain. Hak India untuk dimintai bantuan oleh semua negara Asia Selatan dalam menangani masalah dalam negeri suatu negara diakui. Tetapi ditekankan bahwa bantuan tersebut harus lebih bersifat regional daripada individual. Melihat isi perjanjian perdamaian India telah jauh melampaui apa yang tercermin dalam Doktrin India. Terhadap Srilanka, India lebih banyak berperan daripada SAARC.

PROSPEK PERJANJIAN DAN PENGARUHNYA DI KAWASAN

Diakui oleh Pemerintah New Delhi bahwa perjanjian ini bukanlah suatu akhir dari suatu perjalanan melainkan suatu tahapan baru dalam hubungan India-Srilanka. Namun bertentangan dengan apa yang diharapkan kedua pemimpin pemerintahan, sepuluh minggu setelah penandatanganan perjanjian tidak tampak tanda-tanda penyelesaian permasalahan. Peristiwa penyerangan terhadap Rajiv di Bandar Udara Colombo, pelemparan granat di Gedung Parlemen yang nyaris menewaskan Jayewardene, dan pemboikotan kelompok oposisi di Parlemen terhadap rencana undang-undang otonomi yang disiapkan pemerintah merupakan cerminan ketidakpuasan masyarakat Sinhala. Sementara itu suhu politik yang tetap hangat di wilayah Timur di mana pasukan pemelihara perdamaian India ditempatkan untuk batas waktu yang belum menentu dan ancaman serta tindakan teror para penentang perjanjian yang dipelopori JVP masih terus berlangsung. Tetapi setelah setahun, pelaksanaan perjanjian telah dapat meliputi penarikan mundur pasukan Pemerintah Srilanka dari wilayah Utara dan Timur, bantuan kerjasama militer India untuk mengawasi perbatasan kedua negara dengan kerjasama angkatan laut, dan kerjasama ekonomi dengan kesediaan India membantu pemulihan perekonomian Srilanka.

awal 1988 ini mulai dilaksanakan untuk wilayah di luar propinsi Timur dan Utara, yang ternyata banyak diwarnai kerusuhan; penundaan referendum oleh Pemerintah Srilanka sampai batas waktu yang tidak menentu; pemberian jaminan keamanan bagi penduduk wilayah Utara dan Timur, serta pengakuan bahasa Tamil sebagai bahasa resmi negara selain Inggris dan Sinhala. Selain itu kiranya akan dibuat kerangka kerjasama dalam bentuk perjanjian jangka panjang yang mengatur penempatan personel asing, penggunaan pelabuhan Trincomalee di masa depan pengelolaan minyak di kota pelabuhan itu serta kegiatan lembaga-lembaga penyiaran di Srilanka.

Hal-hal yang sulit dilaksanakan dalam perjanjian adalah penggabungan propinsi Utara dan Timur, pelaksanaan referendum, dan pengakhiran permusuhan antara militan Tamil dan Pemerintah Srilanka khususnya tentang penyerahan senjata Tamil. Jaminan tidak digunakannya wilayah India untuk kegiatan militan Tamil, pemberian amnesti, dan repatriasi pengungsi di kedua negara serta penarikan kembali pasukan pemelihara perdamaian India merupakan hal-hal yang sulit dilaksanakan dalam waktu dekat.

Hambatan utama dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah tidak diikutsertakannya kelompok Tamil sebagai pihak dalam perjanjian. Perkiraan Colombo dan New Delhi yang menganggap penandatanganan akan segera diikuti persetujuan dari kelompok Tamil kurang tepat. Pengakuan pemimpin LTTE Prabakaran yang mengatakan bahwa dirinya terpaksa mengikuti garis yang dibuat India tidak bisa diartikan mereka menyerah. Mereka masih tetap konsisten dengan tuntutan mereka semula untuk mendirikan suatu pemerintahan terpisah dari Colombo.¹⁹

Para pejuang Tamil mempunyai alasan untuk tidak segera melepaskan senjata. Pertentangan di antara kelompok Tamil sendiri selama bertahun-tahun telah menanamkan rasa curiga, waspada dan dendam satu dengan yang lain. Keinginan untuk mencapai keunggulan di antara mereka dan kewaspadaan terhadap tindakan Pemerintah Srilanka menuntut mereka untuk memiliki sarana pertahanan. Hal ini mempengaruhi usaha perlucutan senjata oleh pasukan pemelihara perdamaian India (IPKF). Akhir Desember tahun lalu tercatat 300 tentara India tewas dalam operasi perlucutan. Sebaliknya kelompok Tamil menyatakan bahwa baru sekitar 50% senjata yang mereka serahkan.²⁰

¹⁹Newsweek, 17 Agustus 1987.

Keterlibatan IPKF menumpas pembangkangan perjanjian oleh kelompok Tamil di wilayah Utara dan Timur agaknya mengurangi kecurigaan Srilanka terhadap India yang selama ini dinilai bersikap mendua. Tetapi bagi IPKF sendiri, kurangnya koordinasi, semakin banyaknya korban di antara mereka dan banyaknya korban sipil di kalangan pemberontak Tamil menurunkan moral mereka. Ribuan penduduk sipil kebanyakan Tamil Hindu kembali menderita kelaparan akibat blokade suplai bahan makanan yang dilakukan IPKF. Hal ini mengundang kecaman dari masyarakat Tamil Nadu hingga mereka menuntut ditariknyanya kembali IPKF.

Salah satu pertanyaan yang timbul adalah sampai seberapa jauh kekuatan opini publik India menghendaki ditariknyanya IPKF. Biaya pemeliharaan pasukan yang mencapai sejuta pound per hari dikontraskan dengan kemiskinan yang masih merajalela di India menjadi pertimbangan pemimpin politik India tentang masa depan IPKF. Pemerintah India tidak akan pernah dapat mendukung tuntutan Tamil. Tercapainya suatu negara Tamil di Srilanka akan mempunyai dampak luas di India. Kelompok separatis di Punjab (Sikh), Assam dan sampai tingkat tertentu Tamil Nadu akan menuntut hal serupa dari New Delhi. Hal ini menjadi dilema besar bagi Pemerintah India.

Masalah rencana penggabungan propinsi Utara dan Timur dalam suatu pemerintahan semi otonom dengan suatu referendum agaknya masih jauh dari kenyataan. Kekhawatiran utama mayoritas penduduk Sinhala adalah bahwa dengan penggabungan antara propinsi Utara dan Timur kemungkinan besar kelompok Tamil akan menjalin hubungan dengan sekitar 50 juta masyarakat Tamil di India Selatan yang hanya terpisahkan oleh selat yang berjarak 25 mil. Hal ini akan menjadikan Sinhala minoritas di Srilanka. Suatu kepercayaan umum bagi orang Sinhala adalah bahwa jika mereka terlempar ke luar dari Srilanka mereka tidak akan memiliki ibu negeri di mana mereka menemukan kesatuannya. Hal ini membedakan mereka dari Tamil yang mempunyai Tamil Nadu, Siprus Yunani yang punya Yunani dan kaum protestan Irlandia yang mempunyai Inggris sebagai ibu negerinya.²¹

Dalam mempertimbangkan suatu pemberian otonomi kepada dua daerah itu dua hal dapat dijadikan pertimbangan. Pertama, pembentukan suatu daerah otonom yang dilandasi oleh kecurigaan dan perbedaan yang besar dalam agama, ras, bahasa serta budaya akan memperkuat kemungkinan persengketaan di masa mendatang. Tidak seluruh masyarakat di dua wilayah itu adalah dari suku Tamil. Di propinsi Utara terdapat 87% penduduk Tamil,

tetapi hanya 41% di wilayah Timur. Persengketaan kelompok Tamil dengan golongan Muslim (30%) dan Sinhala (27%) di propinsi Timur yang meningkat akhir-akhir ini antara lain disebabkan oleh keinginan Tamil untuk mempersiapkan referendum dengan mencapai mayoritas. Hal ini menyebabkan mereka menyerang dan mengganggu kelompok lain agar keluar dari wilayah tersebut.

Pertimbangan kedua menyangkut kelangkaan sumber-sumber alam di wilayah tersebut. Bagian timur laut Srilanka merupakan daerah kering di mana muara-muara sungai besar tidak terdapat, sehingga menyulitkan pengembangan pertanian irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Sekarang daerah itu memang dikenal sebagai penghasil barang mineral termasuk silika, bahan campuran semen dan sebagainya. Tetapi masih diragukan apakah daerah otonom itu dapat hidup dengan mengandalkan sumber-sumber yang sekarang ada.²² Skenario yang bisa diperkirakan ialah penundaan pelaksanaan referendum bagi masa depan dua daerah tersebut dan pada gilirannya Pemerintah Colombo akan tetap mengizinkan kehadiran IPKF.

Ketika ditanyakan apakah perjanjian perdamaian yang ditandatangani ini merupakan suatu usaha yang mirip Finlandisasi, Jayewardene menjawab bahwa merupakan kebebasan Srilanka untuk melakukan persahabatan dengan semua negara termasuk India. Tidak dapat disangkal perjanjian tersebut mencerminkan pengurangan kedaulatan politik dan memasukkan Srilanka dalam strategi regional dan global India. Hal ini harus diakui merupakan keberhasilan India dalam menerapkan Doktrin Indianya di kawasan Asia Selatan. Tetapi cara yang ditempuh melalui eksploitasi kekacauan dalam negeri Srilanka untuk suatu maksud hegemoni masa depan disertai dengan kehadiran pasukan pemelihara perdamaian untuk batas waktu yang tidak menentu memberi preseden buruk di kawasan.

Negara-negara di kawasan Asia Selatan mempunyai alasan untuk khawatir akan preseden yang dilakukan India, yang dapat dipandang sebagai pembuka kembali praktek kolonial dan dengan perjanjian tadi muncul sebagai intervensi regional. Di kawasan Asia Selatan Srilanka bukan satu-satunya tipe negara yang dapat menjadi sasaran intervensi India. Hampir semua negara di kawasan ini mempunyai masalah etnis, mayoritas dan minoritas, agama dan kultur. Nepal, Bhutan, Bangladesh dan Pakistan juga mempunyai penduduk yang mempunyai ikatan persaudaraan dengan suatu kelompok masyarakat tertentu di India khususnya di wilayah perbatasan.²³ Mereka tidak menghen-

²²Lebih lanjut tentang pembagian kekuasaan di Srilanka, lihat Kenneth Hubbell, "The Devolution of Power in Srilanka," *Asian Survey*, Vol. XXVII, No. 11 (November 1987): hal. 1015-1021.

daki dominasi India di kawasan meskipun meyakini potensi India untuk menciptakan destabilisasi politik dengan memanfaatkan masalah etnis atau religius yang ada.

Dalam konteks regional Asia Selatan konsep hubungan atas dasar persamaan dengan India sulit diwujudkan, dan sebab itu sulit pula mencari bentuk kerjasama regional yang tepat. Keberhasilan SAARC akan banyak tergantung pada hal ini. Sebagai yang terbesar dalam segala hal dapat diduga New Delhi tidak akan dengan mudah menerima suatu kerangka kerjasama yang tidak menempatkannya dalam posisi dominan di kawasan. Hal ini disadari oleh negara-negara besar dunia dan negara-negara tetangganya di kawasan, sehingga wajar jika Srilanka tidak dapat berbuat banyak. Namun kebesaran India masih harus diuji mengingat masalah Tamil belum tuntas, kendati dewasa ini intensitas konfliknya cenderung menurun.

Para Penulis

ANALISA NO. 5, 1988



DEWANTO, Wisnu. Sarjana Hukum Internasional dari Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 1985; sejak Agustus tahun itu menjadi staf peneliti di CSIS, menangani penelitian dalam bidang Organisasi Internasional, Hukum Laut, Afrika Barat Daya & Selatan serta sebagian Amerika Latin dan Asia Selatan.

HARIS, Syamsuddin. Lulus dari Fakultas Ilmu Politik (sekarang FISIP) Universitas Nasional, Jakarta (1984). Kini, staf peneliti pada Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI, staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, serta anggota dewan redaksi *Ilmu dan Budaya*.

RUKMO, Endi. Sarjana Muda dari Akademi Hubungan Internasional (AHI), Jakarta, 1979 dan MA dalam Hubungan Internasional dari Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 1982; sebagai staf peneliti CSIS, meneliti dan mengamati masalah Asia Timur khususnya Cina. Sebelumnya, Anggota Tim Summary (Ringkasan Peristiwa) CSIS selama tahun 1976-1979.

SUDARSONO, Juwono. Sarjana Publisistik, Universitas Indonesia (1965), MA dari Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat (1971) dan Ph.D. dalam Hubungan Internasional, London School of Economics and Political Science, Universitas London (1978). Kini, Dekan FISIP Universitas Indonesia dan pengajar pada Program Pasca Sarjana di Fakultas dan Uni-

Daftar Artikel ANALISA 1987-1988

No. 1/1987: *Ketahanan Nasional dalam Perubahan Dunia*

- Moerdani, L.B., "Perkembangan Situasi Dunia dan Ketahanan Nasional Kita di Dalamnya."
- Pranarka, A.M.W., "Pasal 32 UUD 1945: Makna dan Dinamikanya."
- Rustam, Soepardjo, "Cita-cita Politik untuk Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahap II."
- Soebadio, Haryati, "Kebudayaan Indonesia di Masa Mendatang."
- Kay, Hugh (disadur oleh Kirdi Dipoyudo), "Suatu Visi Baru mengenai Tata Masyarakat."
- Marshall, T.H. (disadur oleh Kirdi Dipoyudo), "Perang dan Negara Kesejahteraan di Inggris."

No. 2/1987: *Analisa Internasional 1986-87*

- Sutopo, A.R., "Ambivalensi Hubungan Timur-Barat."
- Sutopo, A.R., "Gerakan Non-Blok: Kontinuitas Peranan dan Keterbatasannya."
- Djiwandono, J. Soedjati, "Uni Soviet dan Asia-Pasifik."
- Rukmo, Endi, "Perkembangan di Asia Timur 1986."
- Anggoro, J. Kusnanto, "Dinamika Politik di Pasifik Barat Daya."
- Usman, Asnani, "Arah Perkembangan Asia Tenggara."
- Rukmo, Endi, "Perkembangan di Asia Selatan Tahun 1986."
- Anggoro, J. Kusnanto, "Ketidakpastian Perdamaian Timur Tengah."
- Dewanto, Wisnu, "Apartheid dan Perkembangan di Afrika Bagian Selatan."

No. 3/1987: *Indonesia Dalam Perubahan Ekonomi Dunia*

- Drucker, Peter F. (diterjemahkan oleh Kirdi Dipoyudo), "Ekonomi Dunia yang Telah Berubah."
- Simandjuntak, Djisman S., "Implikasi Perubahan Ekonomi Dunia terhadap Indonesia."
- Joedono, S.B., "Menuju ke Dimensi Ketiga Ekspor Indonesia."
- Pangestu, Tikki, "Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan Ekonomi: Suatu Pandangan Umum."
- Spillane, James L., "Gambaran Global

No. 4/1987: *Pemilu dalam Demokrasi Kita*

- Sartori, Giovanni (diterjemahkan oleh Kirdi Dipoyudo), "Ruang Lingkup dan Arti Demokrasi."
- Mackenzie, W.J.M. (diterjemahkan oleh Kirdi Dipoyudo), "Pemilihan: Arti, Sejarah dan Fungsinya."
- Wahjono, Padmo, "Perwakilan di Bidang Kenegaraan."
- Babari, "Beberapa Kebiasaan Ketatanegaraan dan Persoalannya."
- Pranarka, A.M.W., "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka."

No. 5/1987: *Revitalisasi Ekonomi Indonesia*

- Simandjuntak, Djisman S., "Ekonomi Indonesia Tahun 1986 dan Pencarian Arah Baru Kebijakan Ekonomi."
- Djiwandono, J. Soedradjad, "Perspektif Pembiayaan Pembangunan Nasional: Permasalahan dan Prospek dalam Kaitannya dengan Perkembangan Ekstern."
- Suhartono, R.B., "Milik Intelektual."
- Simandjuntak, Djisman S., "Transfer Teknologi."
- Wijerso, "Harga Patokan Minyak OPEC US\$18 Per Barel: Masalah dan Kemungkinannya."

No. 6/1987: *Pembaruan di Negara-negara Komunis (I)*

- Djiwandono, J. Soedjati, "Pendahuluan."
- Djiwandono, J. Soedjati, "Pembangunan Sosialisme dan Pembaruan di Uni Soviet."
- Rukmo, Endi, "Pembaruan dan Liberalisasi di Cina."
- Usman, Asnani, "Vietnam: Rekonstruksi dan Pembangunan Sosialis."

No. 7/1987: *Perspektif Kehidupan Politik di Indonesia Post-Pemilu 1987*

- Legowo, Tommi, "Evaluasi Kampanye Pemilu 1987."
- Djadjiono M., "Organisasi Kemasyarakatan dan Kampanye Pemilu."
- Sudibjo M., "Pemilihan Umum 1987."
- Partodihardjo, Subagyo, "Perubahan Peta Politik di DKI Jakarta Setelah Pemilu 1987."
- Prawiroyudho, Wiratno, "Evaluasi Pemilu 1987 Daerah Jawa Timur."

No. 8/1987: *Pembaruan di Negara-negara Komunis (III)*

- Anggoro, J. Kusnanto, "Pembaruan di Eropa Timur: Ke Arah Sosialisme Pasar dan Pluralisme Terkendali."
- Budhyarto, Yakob, "Korea Utara: Ideologi dan Kebijakan Ekonomi."
- Dewanto, Wisnu, "Pembaruan di Kuba."
- Sutopo, A.R., "Implikasi Pembaruan Ekonomi Sosialis."

No. 9/1987: *ASEAN Sesudah 20 Tahun (I)*

- Sutopo, A.R., "Perkembangan Regionalisme di Asia Tenggara: Tinjauan Historis dan Teoretis."
- Bandoro, Bantarto, "ASEAN dan Institusionalisasinya."
- Anggoro, J. Kusnanto, "Dimensi Ekonomi Politik Kerjasama Fungsional."
- Soesastro, M. Hadi, "ASEAN dan Perubahan Lingkungan Perdagangan Internasional: Landasan bagi 'Uruguay Round'."
- Timbangan Buku: Anggoro, J. Kusnanto, "ASEAN: Antara Kendala dan Keberhasilan."

No. 10/1987: *ASEAN Sesudah 20 Tahun (II)*

- Simandjuntak, Djisman S., "Kerjasama Ekonomi ASEAN Sesudah KTT Bali dan Manila."
- Djiwandono, J. Soedjati, "Aspek Politik dan Keamanan ASEAN."
- Anggoro, J. Kusnanto, "Dinamika Ekonomi dan Politik Hubungan ASEAN-Jepang."
- Wanandi, Jusuf, "Hari Dapan ASEAN."

No. 11/1987: *Cina dan Kongres XIII PKC*

- Rukmo, Endi, "Arti Kongres Nasional PKC XIII."
- Wanandi, Jusuf, "Peranan Cina di Asia Tenggara."
- Soesastro, Hadi, "Hubungan Indonesia-Cina: Tenang di Semua Front."
- Simandjuntak, Djisman S., "Hubungan ASEAN dengan Amerika Serikat: Perkembangan di Sekitar Tahun 1980."

No. 12/1987: *Ekonomi Dunia dan Indonesia*

- Simandjuntak, Djisman S., "Perang Ekonomi dalam Dunia yang Interdependen."
- Soesastro, Hadi, "Pengaruh Ekonomi Dunia pada Ekonomi Indonesia Dasawarsa 1990-an."
- Nasution, Anwar, "Evaluasi Perekonomian Nasional: Tiga Setengah Tahun Pertama Pelita IV."
- Hutajulu, Iwan P., "Tumbuhnya Pencusaha

No. 1/1988: *Ke Arah Kerjasama Asia-Pasifik*

- Soesastro, Hadi, "Prospek Struktur Perdagangan Kawasan Asia-Pasifik."
- Luhulima, C.P.F., "Dialog ASEAN-Forum Pasifik Selatan: Prospek Kerjasama Regional."
- Sutopo, A.R., "Aspek-aspek Politik Hubungan ASEAN-Korea Selatan."
- Djiwandono, J. Soedjati, "Indonesia dan Pasifik Selatan."

No. 2/1988: *Tantangan Ekonomi Baru*

- Soesastro, Hadi, "Prospek Indonesia Memasuki Tahapan Newly Industrializing Country."
- Djiwandono, J. Soedradjad, "Pengalaman Baru Indonesia dalam Manajemen Ekonomi."
- Simandjuntak, Djisman S., "Sumbangan dan Peluang Perluasan Empleoimen Industrial di Indonesia."
- Sukladi, Tjuk Kasturi, "Sistem Kredit Tradisional: Sebuah Studi Kasus Usaha Tani Tambak di Jawa Timur."

No. 3/1988: *Masalah Global dan Regional*

- Djiwandono, J. Soedjati, "Asia Tenggara dan Hubungan Timur-Barat."
- Wanandi, Jusuf, "Perkembangan Strategis Kawasan Pasifik-Asia Menjelang Abad Ke-21: Suatu Pandangan Regional."
- Djiwandono, J. Soedjati, "Detente Cina-Soviet dan Asia Tenggara."
- Sihbudi, M. Riza, "Konflik Intern di Iran Pasca-Revolusi."

No. 4/1988: *Perkembangan Perekonomian Internasional*

- Djiwandono, J. Soedradjad, "Perkembangan Moneter Internasional."
- Soesastro, Hadi, "Lingkungan Ekonomi Internasional bagi Indonesia dalam Tahun 1990-an."
- Simandjuntak, Djisman S., "Prakarsa Baru Penyatuan Eropa Menyongsong 1992."
- Dokumen: "Ringkasan Peristiwa ASEAN."

No. 5/1988: *Barbagai Dimensi Konflik*

- Haris, Syamsuddin, "Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru."
- Sudarsono, Juwono, "Krisis Indocina: Dimensi Regional dan Internasional."
- Rukmo, Endi, "Konflik Teritorial di Laut Cina Selatan dan Implikasinya Bagi Keamanan Regional."